



# Strategi Lobi dan Negosiasi dalam Penyelesaian Konflik Sosial: Studi Kasus Penolakan Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia

Maria Junita Simarmata\*, Farhan Rahmad Rizaldy, Longga Yestrída L. Sihombing, Muhammad Amiruddin

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang "Strategi lobi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik sosial : Studi kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP di Cilegon, Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis proses lobi dan negosiasi yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon, Banten. Kasus ini merupakan cerminan dari ketegangan antara idealisme konstitusional dan praktik sosial yang kompleks dalam konteks kebebasan beragama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, berita online, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lobi dan negosiasi dalam kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk jemaat HKBP Maranatha, pemerintah daerah, Kemenag RI, MUI Pusat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon. Proses lobi dan negosiasi yang panjang dan kompleks ini akhirnya menghasilkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gereja HKBP Maranatha. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tentang lobi dan negosiasi dalam konteks konflik agama di Indonesia. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas resolusi konflik agama di masa depan.

**Kata Kunci:** Kebebasan Beragama, Lobi Dan Negosiasi, Konflik Agama, Resolusi Konflik

DOI:

<https://doi.org/10.47134/diksima.v1i2.18>

\*Correspondence: Maria Junita Simarmata

Email: [mariajunitasimarmata@gmail.com](mailto:mariajunitasimarmata@gmail.com)

Received: 27-05-2024

Accepted: 28-05-2024

Published: 03-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research discusses "Lobbying and negotiation strategies in resolving social conflicts: A case study of the rejection of the construction of the HKBP Church in Cilegon, Indonesia". The aim of this research is to reveal and analyze the lobbying and negotiation process carried out in resolving the case of rejection of the construction of the HKBP Maranatha Church in Cilegon City, Banten. This case is a reflection of the tension between constitutional idealism and complex social practices in the context of religious freedom in Indonesia. The research method used is a descriptive qualitative approach with document analysis methods. The data in this research was collected from various sources, such as books, journal articles, research reports, online news, and other related documents. The research results show that the lobbying and negotiation process in this case involved various parties, including the HKBP Maranatha congregation, the regional government, the Indonesian Ministry of Religion, the Central MUI, and the Cilegon City Religious Harmony Forum (FKUB). This long and complex lobbying and negotiation process finally resulted in a Building Construction Permit (IMB) for the construction of the HKBP Maranatha church. This research contributes to the literature on lobbying and negotiation in the context of religious conflict in Indonesia. The findings of this research can be used to improve the effectiveness of religious conflict resolution in the future.

resolution

**Keywords:** Religious freedom, Lobbying and negotiations, Religious conflict, Conflict

## Pendahuluan

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menganggap kebebasan beragama sebagai prinsip konstitusional yang penting. Pasal 29 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan keyakinan yang dipilihnya (Merliyana, 2022). Kebebasan berekspresi dilindungi oleh konstitusi dan diakui sebagai hak asasi manusia yang esensial, sebagaimana diartikulasikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (Setiawan & Anggito, 2018). Tapi meskipun demikian, sering kali muncul konflik antara hak-hak yang tercantum dalam konstitusi dan keadaan masyarakat yang ada. Menafsirkan konstitusi untuk mengatasi perselisihan sosial menimbulkan kesulitan dalam masyarakat yang memiliki budaya yang beragam. Studi kasus tentang penolakan masyarakat terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon ini merupakan contoh konflik antara hak-hak konstitusional dan norma-norma masyarakat (Hidayanto et al., 2020). Penolakan tersebut menunjukkan bagaimana dampak dari pertimbangan masyarakat dan daerah dapat mengesampingkan perlindungan konstitusional atas kebebasan beragama (Safitri et al., 2021).

Kasus ini menarik untuk dikaji karena menggambarkan beragam interaksi sosial antara peraturan, hak asasi manusia, dan faktor-faktor sosial dalam konteks pembangunan rumah ibadah di Indonesia. Keputusan untuk tidak membangun gereja tersebut telah memicu diskursus publik mengenai toleransi dan kerukunan beragama, serta implementasi dan pemahaman terhadap peraturan di ranah ini. Dalam pidatonya tentang perdamaian beragama, Menteri Agama menekankan perlunya moderasi beragama dalam mempromosikan persatuan nasional. Pada tahun 2023, Menteri Agama mencanangkan Tahun Kerukunan Umat Beragama, dengan menekankan bahwa kerukunan merupakan syarat penting bagi kemajuan dan stabilitas bangsa, yang dapat dicapai melalui hidup berdampingan secara damai dan persatuan. Namun demikian, kondisi saat ini sering kali menyimpang dari tujuan tersebut (Harmonis, 2024).

John Locke dan Immanuel Kant, yang menganut prinsip-prinsip filsafat liberal, telah mengajukan banyak argumen yang mendukung otonomi individu sebagai mekanisme untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Teori keadilan John Rawls dan teori kepemilikan pribadi Robert Nozick saat ini sedang diperdebatkan sehubungan dengan pertanyaan apakah individu memiliki hak moral atau hak hukum atas kebebasan beragama atau berkeyakinan (Karya & Hendrayana, 2020). Konflik antara hak-hak konstitusional dan realitas sosio-ekonomi di Indonesia merupakan masalah yang rumit dan memiliki banyak sisi. Menelaah konstitusi dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai fundamental sebenarnya dapat berkontribusi pada ketegangan sosial. Studi kasus mengenai penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha yang terdapat di Cilegon menunjukkan dampak dari tekanan masyarakat terhadap proses pengesahan pendirian rumah ibadah (Suhairi et al., 2023).

Menelaah kebebasan beragama di Indonesia merupakan hal yang penting dalam struktur sosial dan politik negara ini. Indonesia, dengan beragam agama dan kepercayaan, menghadapi banyak tantangan dalam menjamin bahwa kebebasan beragama tidak hanya dituntut secara hukum, tetapi juga ditegakkan secara efektif dalam praktiknya. Penelitian ini sangat penting karena memberikan pemahaman yang berharga mengenai korelasi yang rumit antara undang-undang dan peraturan dengan praktik-praktik keagamaan di masyarakat (Hilman et al., 2023). Selain itu, penelitian ini juga menekankan taktik-taktik yang efisien untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan yang didasarkan pada keyakinan agama. Menurut penelitian Putri Khofifah Nursaidah, strategi lobi dan negosiasi telah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik dan mendamaikan kepentingan yang berbeda. Studi ini juga memasukkan materi yang menunjukkan pentingnya mengoptimalkan hubungan yang kuat dan dapat diandalkan melalui proses lobi dan negosiasi (Ernungtyas, 2020).

Dalam konteks politik, hasil penelitian ini menawarkan kepada para pembuat kebijakan sudut pandang yang berharga tentang dampak aturan yang ada terhadap kebebasan beragama, serta potensi penyesuaian kebijakan untuk mengurangi prasangka dan mempromosikan toleransi beragama. Selain itu, informasi ini memiliki arti penting bagi masyarakat luas karena dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerukunan beragama dan memberikan alat bagi individu untuk memahami dan mengatasi konflik agama yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

## **Kajian Teori**

### **Konflik Sosial**

Konflik sosial merupakan suatu bentuk ketegangan, pertentangan atau perbedaan antara individu, kelompok atau lembaga dalam masyarakat yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, tujuan, atau sumber daya. Konflik sosial dapat ditimbulkan dalam berbagai tingkatan, mulai dari konflik antara individu, konflik antar kelompok hingga konflik yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Cangara, 2009).

Menurut (Ardias et al., 2019) pesan sebagai penyebab konflik sosial adalah hubungan-hubungan sosial dengan pesan yang menghasilkan berbagai efek komunikasi, baik terencana maupun tidak terencana seperti pesan politik dan pesan ekonomi. Konflik sosial dapat berdampak pada hubungan antar individu, stabilitas sosial dan bahkan keamanan suatu masyarakat.

Salah satu upaya penyelesaian konflik menurut (Amin, 2017) adalah komunikasi dengan cara negosiasi. Negosiasi merupakan suatu tindakan yang strategis yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan proses komunikasi dimana setiap pihak yang terlibat memiliki pendapat dan sudut pandang yang berbeda. Negosiasi bertujuan untuk mencari klarifikasi dan penyelesaian tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba mencari jalan tengah tentang cara penyelesaiannya. Pada prinsipnya, negosiasi akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat untuk membuat kebijakan dan keputusan agar sesuai dengan kepentingan bersama dan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. (Rouddah et al., 2021)

Dalam upaya memahami konflik agama dan resolusinya di Indonesia, penelitian oleh Takdir et al. (2021) memberikan wawasan penting mengenai dinamika konflik agama selama era Orde Baru. Penelitian ini menemukan bahwa konflik identitas kelompok, tingkat kekacauan dan mobilisasi sosial, tindakan represif oleh kelompok kekuasaan, dan konflik kolektif antara kelompok komunal merupakan faktor utama yang mempengaruhi konflik agama di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti peran aktif masyarakat sipil dalam mendorong kesepakatan damai antara kelompok-kelompok yang berkonflik, menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses resolusi konflik (Kustiawan et al., 2022).

### **Strategi Lobi dan Negosiasi**

Teori lobi dan negosiasi, khususnya dalam konteks resolusi konflik, telah dikembangkan untuk memahami bagaimana kepentingan yang berbeda dapat direkonsiliasi. Laboutková et al. (2020) menyajikan model teoretis lobi yang berpusat pada pemangku kepentingan, berdasarkan prinsip-prinsip pilihan rasional. Model ini menekankan pentingnya transparansi dan simetri informasi dalam proses negosiasi. Dalam konteks non-transparan, lobi dapat menyebabkan kegagalan pemerintahan karena dapat mengarah pada praktik pengaruh ilegal dan korupsi. Oleh karena itu, regulasi yang efisien dan transparansi dalam lobi diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan publik dilayani dengan baik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rosdiani et al., 2021) Lobi merupakan penyatuan yang mengarah kepada tujuan yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Lobi sangat diperlukan untuk memperoleh keuntungan dari pihak tertentu dan untuk kepentingan organisasi. Menurut (Hadi, 2019) Lobi merupakan proses menyalurkan berbagai pendapat untuk mendukung organisasi baik individu seperti pejabat maupun lembaga seperti lembaga pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa lobi memiliki peranan penting bagi individu maupun organisasi untuk membantu suksesnya suatu organisasi dan memudahkan keperluan organisasi dan sebagainya. Dalam proses lobi dan negosiasi terdapat aktivitas yang bersifat informal (tidak resmi) dan cenderung memiliki komunikasi pesan yang sifatnya persuasif. Saat proses komunikasi diperlukan persiapan yang baik saat melobi dengan menyediakan tempat serta pendapat dan solusi yang dapat meyakinkan pihak yang ingin dilobi .

Penelitian yang lain juga memberikan pengertian bahwa lobi adalah proses yang mempengaruhi, membujuk dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dibutuhkan oleh pemberi pengaruh. Hrebenar lebih lanjut menyatakan bahwa terdapat dua titik strategi dalam lobi, yaitu Direct Lobbying dan Indirect Lobbying. Direct Lobbying berarti lobi dengan membawa perwakilan kelompok untuk langsung berhubungan atau bertatap muka dengan pembuat kebijakan. Sementara Indirect Lobbying dilaksanakan melalui kampanye, demonstrasi, serta menggunakan alat media massa (Hoffrening, 1995: 53) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ardianto et al., 2020).

Negosiasi adalah sebuah metode tawar-menawar melalui perundingan untuk menciptakan keselarasan dari sebuah permasalahan yang terjadi. Lasmahadi (2005:87) mengemukakan bahwasannya ada beberapa jenis dari strategi negosiasi, antara lain: (1) win win (integrative

negotiation), adalah strategi yang ditekankan kepada sebuah kelompok yang ingin mendapatkan hasil yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak. (2) win lose adalah sebuah strategi yang dimana ketika salah satu pihak berlomba-lomba untuk memenangkan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi pihak tersebut. (3) Lose-lose, adalah sebuah strategi yang dimana kedua belah pihak saling merasa dirugikan dikarenakan gagal dalam memilih strategi di dalam bernegosiasi. (4) lose-win, adalah sebuah strategi yang di dalamnya salah satu pihak memilih untuk kalah (lose) dengan tujuan mendapatkan manfaat dari kalahnya tersebut (Saputri, 2023).

Lobi merupakan tahap perkenalan yang dibangun dengan suasana dan pendekatan dengan menyesuaikan suasana interaksi. Misalnya ketika berkomunikasi dengan klien maka komunikasi yang dibangun akan bersifat lebih informal. Negosiasi merupakan tahap lanjutan dari lobi dengan mempersiapkan data yang meyakinkan klien. Sebagai komunikator, negosiator harus dapat memahami lawan bicara sehingga memperoleh pengertian bersama di antara kedua belah pihak yang berkomunikasi. Strategi lobi dan negosiasi merupakan keputusan yang membantu menyelesaikan masalah sehingga mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan memberikan layanan yang maksimal terhadap kebutuhan klien. Teori persuasi juga memiliki peranan penting dalam proses lobi dan negosiasi. Teori persuasi meyakinkan publik menjadi sasaran organisasi dengan memahami sikap, opini atau perilaku tertentu. Dalam artian, perilaku persuasi tidak hanya untuk menafsirkan tindakan sendiri tetapi juga harus meyakinkan publik melalui proses interaksi.

Penelitian ini akan mengadopsi kerangka kerja teoritis untuk menganalisis kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Dengan memahami bagaimana lobi dan negosiasi dapat mempengaruhi hasil konflik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut, penelitian ini berusaha untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas resolusi konflik agama di Indonesia.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menetapkan dasar teoritis untuk penelitian ini, menghubungkan literatur yang ada dengan kasus spesifik yang sedang diteliti, dan memberikan kerangka kerja untuk analisis yang akan dilakukan. Penelitian ini akan menggali lebih dalam ke dalam literatur yang ada untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang lobi dan negosiasi dalam konteks konflik agama di Indonesia, dengan tujuan untuk menarik pelajaran yang dapat diterapkan dalam kasus serupa di masa depan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial melalui dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan dan data sekunder yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, berita online, dan sumber-sumber kredibel lainnya yang berkaitan dengan proses lobi dan negosiasi dari kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pencarian literatur yang ekstensif untuk mengidentifikasi dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus penolakan pembangunan gereja. Setelah dokumen terkumpul, peneliti akan melakukan analisis isi untuk mengekstrak informasi yang berkaitan dengan proses lobi dan negosiasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Analisis ini akan dilakukan dengan cara mengkategorikan data, mengidentifikasi tema-tema utama, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data.

Keabsahan data dalam penelitian ini akan diperkuat melalui triangulasi sumber, di mana peneliti akan membandingkan dan mengkontraskan informasi dari berbagai dokumen untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan. Selain itu, peneliti juga akan memperhatikan kredibilitas sumber dengan memilih dokumen yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang diakui dan penulis yang memiliki otoritas di bidangnya.

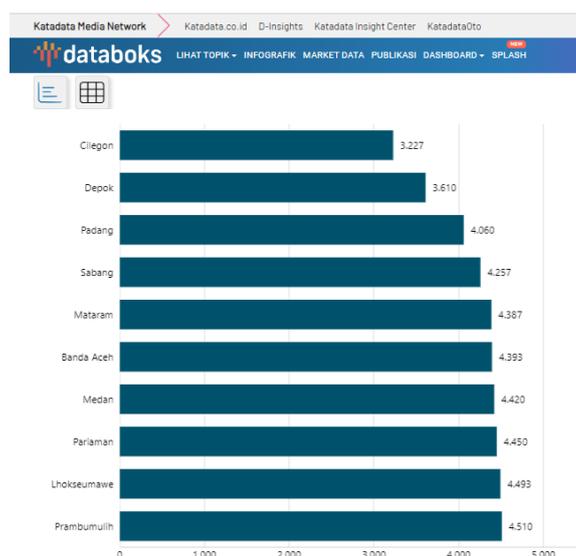
Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon, serta memberikan wawasan tentang bagaimana lobi dan negosiasi dapat mempengaruhi penyelesaian konflik agama di Indonesia.

Penelitian ini akan sepenuhnya bergantung pada analisis dokumen dan data sekunder yang telah tersedia secara publik. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan dengan menghormati privasi dan tanpa mengganggu subjek penelitian, sekaligus memanfaatkan sumber daya yang sudah ada untuk menghasilkan temuan yang berharga.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Toleransi Umat Beragama**

Definisi dari intoleran sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak tenggang rasa, dalam kata lain dapat disimpulkan arti dari intoleran adalah pandangan seseorang yang mengesampingkan eksistensi dari toleransi yang didalamnya mengandung empati terhadap orang lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan adalah sulitnya pembangunan tempat ibadah gereja HKBP di Cilegon. Cilegon sendiri merupakan kota di provinsi banten yang dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti kota tersebut memang memiliki isu intoleransi.



**Gambar 1:** Kota Paling Intoleran di Indonesia berdasarkan data dari databoks.katadata.co.id tahun 2022

Penilaian data diatas sendiri terdiri dari 4 indikator, yaitu regulasi pemerintahan kota, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan. Fenomena intoleransi ini merupakan masalah yang tidak dapat dibiarkan, dampak dari fenomena ini dapat terjadinya kohesi sosial dan dapat memicu permasalahan atau konflik antar kelompok, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang ada di kota tersebut. oleh karena itu upaya mencegah dan pemecahan masalah harus terus dikembangkan salah satunya melalui lobi dan negosiasi. disisi lain peran pemerintah dan masyarakat setempat juga sangat krusial dalam menangani fenomena ini dan memberi pemahaman tentang pentingnya toleransi antar umat beragama. karena dampaknya bukan hanya merugikan kelompok minoritas tetapi juga menjadi penilaian negatif yang akan diperoleh dari kota itu sendiri.

## 2. Penyebab Intoleransi

Situasi yang terjadi di negara Indonesia adalah kondisi dimana masyarakatnya yang dikuasai oleh sumber daya manusia yang *low class*. yang dimana memiliki kecenderungan untuk melakukan sebuah perubahan yang signifikan, kritis, namun yang dilakukan tidaklah rasional. disisi lain negara Indonesia juga merupakan negara yang majemuk dimana banyaknya perbedaan antar suku, agama, budaya dan lain sebagainya yang sehingga dapat mudah menyebabkan gesekan dari kemajemukan tersebut.

Penyebab selanjutnya adalah perkembangan sosial media yang dimana sikap intoleransi dapat dengan mudah disebarluaskan dan akan menjadi masalah yang sangat kompleks serta menciptakan variabel baru dari masalah yang ditimbulkan. maka dari itu perkembangan sosial media juga harus dikontrol oleh penggunaanya yang merupakan tantangan kedepannya guna memerangi intoleransi antar umat beragama. Dilain sisi memang sosial media memiliki dampak positif, maka dari itu penggunaanya harus mengantisipasi dari masalah yang akan timbul dengan cara menyebarkan informasi tentang pentingnya edukasi toleransi.

### 3. Elemen Intoleransi

Intoleransi sendiri sekurang-kurangnya memiliki tiga elemen didalamnya:

- a. Individu mayoritas yang merasa superior dari individu yang lainnya.  
Individu yang memiliki sifat intoleransi senang mengurus dan membantah agama yang dianut oleh minoritas. agama yang dianut oleh minoritas akan langsung dinilai salah oleh individu yang merasa dirinya superior. individu seperti ini juga senang menghina dengan suatu hal yang tidak ia yakini.
- b. Individu dengan sengaja mengusik individu lainnya.
- c. Kelemahan individu dalam mengekspresikan ketidakcocokan terhadap individu lain yang memiliki latar belakang agama yang berbeda dan ketika individu memiliki sifat intoleransi maka individu tersebut akan menyatakan secara jujur apa adanya atas ketidak cocokannya tersebut.

### 4. Proses Lobi dan Negosiasi dalam Penanganan Intoleransi

Dalam proses lobi dan negosiasi peran pemerintah disini cukup krusial serta ada juga peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sendiri merupakan suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah guna membangun dan memelihara serta memberdayakan umat beragama untuk kepentingan kesejahteraan dan kerukunan antar kelompok.

- a. Diskusi antar tokoh umat agama. berdasarkan data yang diperoleh peneliti pertemuan antar tokoh umat agama ini diselenggarakan oleh FKUB target dari diskusi ini merupakan perwakilan dari beberapa tokoh umat agama yang ada di Indonesia. acara ini digelar pada kamis, 4 Agustus 2022, adapun isi pembahasannya merupakan tata cara pendirian rumah ibadah serta tidak lupa peran dari kementerian agama dalam pembinaan agama di kota cilegon. Adapun maksud dari tujuan diadakannya diskusi tersebut guna untuk meredam konflik yang sedang terjadi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Hadi (2019) Lobi merupakan proses menyalurkan berbagai pendapat untuk mendukung organisasi baik individu seperti pejabat maupun lembaga seperti lembaga pemerintah.
- b. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006. sosialisasi PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 ini dilaksanakan oleh FKUB kota Cilegon. adapun materi yang diberikan oleh ketua FKUB saat itu kurang lebih sama pada saat diskusi antar tokoh umat agama yaitu tata cara pendirian rumah ibadah serta tidak lupa peran dari kementerian agama dalam pembinaan agama di kota cilegon. tujuan dari sosialisasi gunanya untuk mengingatkan kelompok yang terkait terhadap sebuah konsep aturan yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan tersebut. mengingat kericuhan yang terjadi tentang pembangunan rumah ibadah saat itu. upaya yang terus dilakukan saat ini guna untuk menghindari sikap intoleransi dalam beragama yang terjadi di kota Cilegon dengan

menggunakan pendekatan kewarganegaraan yang menonjolkan kesepadanan tanpa memandang latar belakang agama yang dianut.

#### 1) Rapat Koordinasi Tokoh Masyarakat Lintas Agama (Tomaliga)



**Gambar 2:** instagram @badankesbangpolcilegon

Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh badan kesbangpol beserta tokoh masyarakat lintas agama rapat ini diselenggarakan dengan upaya menampung beberapa pendapat maupun aspirasi dari beberapa tokoh masyarakat lintas agama guna membangun ketertiban umat beragama yang ada di kota tersebut. disisi lain tujuan dari rapat ini adalah guna menyusun rencana aturan kehidupan keagamaan yang lebih sistematis untuk menghindari kericuhan yang akan terjadi nantinya di kemudian hari.

#### 2) Forum Pemuda Lintas Agama

Selain Tomaliga badan kesbangpol juga menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. kegiatan ini merupakan bentuk upaya pemerintah daerah setempat guna menampung aspirasi dari para pemuda lintas agama. kegiatan ini sama halnya dari kegiatan yang lainnya yaitu mencegah tindakan sikap intoleransi melalui pemahaman tentang perdamaian bagi para generasi yang akan mendatang serta menciptakan kebijakan yang tidak bersifat keberpihakan atau diskriminatif. menekankan upaya-upaya tersebut karena seringkali tindakan intoleransi berasal dari kebijakan pemerintah yang bersifat keberpihakan dan beberapa kesalahan dalam menangkap tentang ragam yang ada.

tujuan dari dibentuknya forum ini oleh badan kesbangpol tidak lain untuk menghindari intoleransi yang terjadi pada generasi muda serta saling menghormati dan membangun tali kasih antar umat beragama lainnya di kota Cilegon dan tidak lupa forum ini juga memberikan tentang pentingnya pendidikan perdamaian dan diharap dari

pendidikan yang sudah didapat di implementasikan guna menjaga perdamaian umat beragama.

## **Simpulan**

Proses lobi dan negosiasi dalam kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon menunjukkan bahwa dialog dan komunikasi yang terbuka dan konstruktif merupakan kunci untuk menyelesaikan konflik agama. Upaya lobi dan negosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk jemaat HKBP Maranatha, FKUB, Kemenag RI, MUI Pusat, dan pemerintah daerah, akhirnya membuahkan hasil dengan keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gereja pada Februari 2022.

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa faktor mendukung keberhasilan proses lobi dan negosiasi, di antaranya: (a) kegigihan jemaat HKBP Maranatha dalam memperjuangkan hak mereka untuk beribadah. (b) keterlibatan aktif FKUB sebagai mediator yang netral dan imparial. (c) dukungan dari Kemenag RI dan MUI Pusat yang mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama. (d) kesediaan pemerintah daerah untuk membuka dialog dan mencari solusi yang win-win solution.

Terlepas dari hal ini, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam upaya menyelesaikan konflik agama di Indonesia, di antaranya:

1. Misinformasi dan prasangka yang sering kali memperkeruh suasana dan mempersulit proses dialog.
2. Kepentingan politik yang terkadang dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk memperuncing konflik.
3. Kurangnya pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama di kalangan masyarakat.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas resolusi konflik agama di Indonesia, di antaranya: (a) meningkatkan edukasi tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui pendidikan formal dan informal. (b) memperkuat peran FKUB sebagai mediator dalam konflik agama. (c) pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses pembuatan keputusan terkait pendirian rumah ibadah. (d) menegakkan hukum secara konsisten terhadap pelaku intoleransi dan ujaran kebencian.

Dengan terus menerus berusaha membangun dialog dan juga komunikasi yang terbuka dan konstruktif, serta melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan konflik agama yang sistematis dan komprehensif, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih toleran dan inklusif bagi semua umat beragama.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa studi kasus dapat menjadi alat yang berharga untuk memahami dinamika kompleks konflik agama dan merumuskan strategi resolusi yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi literatur tentang resolusi konflik agama di Indonesia dan menginspirasi penelitian lebih lanjut di bidang ini.

### Daftar Pustaka

- Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good village governance in financial management to create independent village: Study of Pecatu village government. *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(3), 334–344.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amin, M. A. S. (2017). Komunikasi sebagai penyebab dan solusi konflik sosial. *Jurnal Common*, 1(2). <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.573>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ansori, L. (2017). Diskresi dan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150.
- Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik lobi dan negosiasi oleh legislator sebagai bentuk komunikasi politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25–39. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10009>
- Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik lobi dan negosiasi oleh legislator sebagai bentuk komunikasi politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25–39.
- Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik lobi dan negosiasi oleh legislator sebagai bentuk komunikasi politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25–39.
- Ardias, A. Y., Sumartini, S., & Mulyono, M. (2019). Konflik sosial dalam novel *Karena Aku Tak Buta* karya Rendy Kuswanto. *Jurnal Sastra Indonesia*, 8(1), 47–56. <https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.29949>
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Intoleran (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 29 November 2021, melalui <https://kbbi.web.id/intoleran>
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fells, R. (2016). *Effective negotiation: From research to results*. Cambridge University Press.

- Hakim, L., Nurikhsan, F., Jamil, H. P., & Safitri, D. (2021). Strategi lobi dan negosiasi dalam mendapatkan sponsorship pada event IKOM Entrepreneurship Fest 2020. *Jurnal InterAct*, 10(2), 59–68.
- Harmonis, H. (2024). Lobbying and negotiation practices as messages and forms of political communication in the Indonesian government. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*, 14(1), 496–504.
- Hendrayana, Y., & Karya, U. (2020). Peran keterampilan negosiasi terhadap manajemen konflik melalui intermediasi efektivitas komunikasi. *Jurnal Parameter*, 5(10), 113–126.
- Hulu, R. D. L., Habib, M. F., Tia, R. S., Husna, F. M., & Suhairi, S. (2023). Pentingnya teknik lobi dan negosiasi dalam komunikasi bisnis. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 1(5), 567–574.
- Kuswandi, A., Nuraini, S., Alrasyid, M. H., Sadiyyah, Z. N., & Hilman, Y. A. (2023). The performance of Regency–City DPRD in the formulation of regional regulations in Indonesia. *Paradigma*, 20(2), 23–42.
- Laboucková, Š., Šimral, V., & Vymětal, P. (2020). Transparent Lobbying and Democracy.
- Leatherman, J., & Väyrynen, R. (1995). A theoretical model of lobbying.
- Ramadhani, S., Nasution, J. H., Azhari, M. I., & Kustiawan, W. (2022). Strategi lobi dan negosiasi dalam proses komunikasi politik. *Jurnal Komunikasi Politik*, 1(1), 89–95.
- Ramadhani, Y., & Manafe, L. A. (2022). Strategi lobi dan negosiasi dalam membina hubungan baik klien KSP Citra Abadi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5, 243–252. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i1.456>
- Rosdiani, K., Krisna, B., Hidayatullah, M. I., & Safitri, D. (2021). Strategi lobi dan negosiasi pembangunan sekolah di Utara, Kampung Baru Nelayan, Cilincing RT 07/ RW 08 Jakarta Utara. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 13(2), 147–158. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v13i2.14753>
- Rouddah, K. N., Barkah, C. S., & Novel, N. J. A. (2021). Analisis negosiasi bisnis perusahaan trading dengan pengepul kopi Toraja (Studi pada PT. Danapati Prakasa Sentosa). *Jurnal Bisnis Strategi*, 30(1), 47–53. <https://doi.org/10.14710/jbs.30.1.47-53>
- Saputri, O. (2023). Kemampuan berkomunikasi sebagai indikator keberhasilan lobi dan negosiasi.
- Takdir, M., Mushthafa, M., & Rozinah, A. S. (2021). Al-Adyan: Journal of Religious Studies.
- Tinambunan, T. M., & Siahaan, C. (2022). Implementasi teknik lobi dan negosiasi yang efektif dalam melakukan bisnis. *Jurnal Bisnis*, 2(2), 55–67.